

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy. 2007. Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.
- Brodjonegoro P.S, Bambang. 2004. Participatory Budgeting in Decentralized Indonesia: What Do Local People Expect?. *UN Research: Participatory Planning and Budgeting at The Sub-National Level*.
- Dwiyanto, dkk. 2003. Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Galang Printika.
- Florin, Bolojan. 2011. Bottom-Up/Top-Down Budgeting. *Proquest Journal*
- Goldfrank, Benjamin and Schneider, Aaron. 2006. *Competitive Institution Building : The PT and Participatory Budgeting in Rio Grande do Sul*. Proquest Journal
- Melgar, Teresa R. 2014. *A Time of Closure ? Participatory Budgeting in Porto Alegre , Brazil , after the Workers ' Party Era*. Proquest Journal
- Moeloeng, J, Lexy. 2010. Metodology Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammading. 2013. *Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Pada Proses Perencanaan Dan Penganggaran Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010*. Tesis. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Pradica, Hendy. 2014. *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2012*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Lampung.
- Purwoko.2008.*MemahamiAspirasiRakyat.(Online),*<http://www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/2008/09/25memahami-aspirasi-rakyat/>. diakses 28 Maret 2016.
- Salman, Muhammad. 2009. *Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008*. Tesis. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Sandi, Rintaka H. 2015. *Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Yogyakarta. Yogyakarta.

- Sopannah. 2008. Studi Fenomenologis : Menguak Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan APBD. *SNA 12 Palembang*.
- Wampler, Brian. 2000. *A Guide to Participatory Budgeting*. internationalbudget.org
- Warastuti, Dini. 2013. *Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodasi dalam APBD Kota Salatiga*. Tesis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- Weber, Rachel. 2015. *Participatory Budgeting and Planning*. Proquest Journal
- Wihartanti, Sri. 2006. *Kajian Proses Perencanaan Partisipatif dalam Penyusunan RKPD 2006 Kota Salatiga*. Tesis. Yogyakarta: UGM.
- Wijaksono, Sigit. 2013. Pengaruh Lama Tinggal Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Pemukiman. *Jurnal ComTech*, Volume 4.
- Wirawan, dkk. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal JISIP* Volume 4.
- Zuhriansyah, Muhamad. 2013. Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Cipta Karya, Permukiman Dan Perumahan (Studi Di Desa Baharu Utara Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* Volume II.
- Republik, Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republik, Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- Republik, Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Republik, Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik, Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Republik, Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Republik, Indonesia. Surat Edaran Bersama Mendagri dan Bappenas Nomor 0008/M.PPN/01/2007 tentang Surat edaran bersama Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

